KATA PENGANTAR v

KATA SAMBUTAN vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Hakikat Negara Hukum 1
B. Peristilahan dan Pengertian 5
C. Sejarah Perkembangan Hukum Administrasi Negara 9
D. Tempat Hukum Administrasi Negara Dalam Sistem Hukum 16

BAB II RUANG LINGKUP HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

A. Ruang Lingkup 19
B. Hubungan Hukum Administrasi Negara Dengan Cabang Hukum Lainnya 26
   1. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara 26
   2. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Perdata 32
   3. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana 33
C. Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara Sulit Ditentukan 33

BAB III SUMBER HUKUM ADMINISTRAS NEGARA
A. Istilah dan Pengertian 35
B. Sumber Hukum Dalam Arti Materil 36
C. Sumber Hukum Dalam Arti Formil 37
1. Undang-Undang 37
2. Konvensi 38
3. Yurisprudensi 38
4. Doktrin 38

BAB IV INSTRUMEN PEMERINTAHAN
A. Pengertian Instrumen Pemerintahan 43
B. Macam-Macam Instrumen Pemerintahan 45
1. Peraturan Perundang-Undangan 45
2. Ketetapan Perundang-Undangan 47
3. Diskresi (*Freies Ermessen*) 54

BAB V ASPEK HUKUM PELAYANAN PUBLIK
A. Konsep Dasar Pelayanan Publik 61
1. Pengertian dan Dasar Hukum 61
2. Masalah Pelayanan Publik 62
3. Fungsi Pelayanan Pemerintah 67
4. Kriteria Pelayanan Publik 69
5. Azas dan Prinsip Pelayanan Publik 72
6. Standar Pelayanan Publik 73
7. Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik 74
8. Biaya Pelayanan Publik 74
9. Tingkat Kepuasan Masyarakat 75
10. Pengawasan Penyelenggaraan 77
B. Konsep Dasar Perizinan 77
1. Pengertian 77
2. Jenis dan Macam 80
3. Perizinan Sebagai Instrumen Hukum Sikap Tindak Administrasi Negara 82

BAB VI WEWENANG PEMERINTAHAN
A. Konsep Dasar 87
B. Dasar-Dasar Wewenang Pemerintahan 91
C. Cara Memperoleh Wewenang Pemerintahan 93
D. Tindakan Pemerintah 98
1. Unsur Tindakan Hukum Pemerintah 98
2. Macam Tindakan Hukum Pemerintah 99
3. Karakteristik Tindakan Hukum Pemerintah 99

BAB VII HUKUM BIROKRASI NEGARA
A. Gambaran Umum 101
B. Beberapa Pengertian 102
C. Landasan Hukum dan Kelembagaan 104
D. Sejarah Lahirnya Birokrasi 109
E. Peran Birokrasi dan Reformasi Birokrasi 110
F. Reinventing Government 112
G. Beberapa Pendapat Terkait Eksistensi Birokrasi .. 112

BAB VIII HUKUM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAERAH
A. Peristilahan dan Pengertian-Pengertian 115
B. Timbulnya Gagasan Berpemerintahan Daerah 116
C. Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 118
D. Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah 120
E. Calon Kepala Daerah 123
F. Tugas dan Wewenang Kepala Daerah 124
G. Larangan dan Pemberhentian Kepala Daerah 126
H. Organisasi Perangkat Daerah 127
I. Pendapatan Asli Daerah 129
J. Penyusunan, Penetapan dan Pengelolaan APBD 131
K. Surplus dan Defisit APBD 133

L. Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Dibidang Pertanahan 133

BAB IX ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG LAYAK

A. Gambaran Umum 139
B. Sejarah Lahirnya Asas-Asas Pemerintahan Yang Layak 140
C. Beberapa Pendapat Terkait Good Governance ... 141
D. Karakteristik Good Governance 143
E. Maladministrasi Kontra Good Governance 145

BAB X PENEGAKAN HUKUM DI LINGKUNGAN PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA

A. Pentingnya Penegakan Hukum 153
B. Organisasi Peradilan Administrasi Negara 155
C. Upaya Dalam Penyelesaian Sengketa di Peradilan Administrasi Negara 156
D. Fungsi dan Ciri Peradilan Administrasi 158
E. Masalah Kompetensi Absolut PTUN 159

DAFTAR PUSTAKA 163

LAMPIRAN

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 167
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia 205